

**ABSTRAK**

**TINJAUAN YURIDIS BANTUAN KEUANGAN NEGARA BAGI**

**PARTAI POLITIK DALAM PRESPEKTI DEMOKRASI**

Samuel Suiq Lewerissa 2210623076, Taufiqqurohman Syahuri, Irwan Triadi.

Sumber keuangan partai politik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu, iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari negara. Bantuan keuangan dari negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan dari negara berdasarkan pasal 34 ayat (3) diberikan hanya kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga legislatif saja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bantuan keuangan dari negara kepada partai politik sudah sesuai dengan prinsip demokrasi yang ideal. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik, namun bantuan tersebut hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dilembaga legislatif saja. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan demokrasi yang ideal, bantuan keuangan dari negara seharusnya juga diberikan kepada partai politik yang tidak mendapatkan kursi di lembaga legislatif namun ikut dalam kontestasi pemilihan umum, dikarenakan seluruh partai politik memiliki hak, kewajiban serta fungsi yang sama tanpa terkecuali, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perUndang-Undangan. Dengan langkah ini, diharapkan dalam mewujudkan suatu sistem yang dimokratis bagi setiap partai politik.

**Kata Kunci :** Bantuan Kuangan, Partai Politik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Demokrasi.

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL REVIEW OF STATES FINANCIAL ASSISTANCE FOR POLITICAL PARTIES IN THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY***

Samuel Suiq Lewerissa 2210623076, Taufiqqrohman Syahuri, Irwan Triadi.

*The financial sources of political parties as stated in Article 34 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties are, membership fees, legally valid donations and financial assistance from the state. Financial assistance from the state through the State Budget/Regional Budget. Assistance from the state based on Article 34 paragraph (3) is given only to political parties that get seats in the legislative institution. This study aims to analyze financial assistance from the state to political parties in accordance with the principles of ideal democracy. With a normative legal approach, this study found that although regulations have regulated financial assistance to political parties, this assistance is only given to political parties that get seats in the legislative institution. Therefore, in order to realize an ideal democracy, financial assistance from the state should also be given to political parties that do not get seats in the legislative institution but participate in the general election contest, because all political parties have the same rights, obligations and functions without exception, as mandated in the laws and regulations. With this step, it is hoped that a democratic system will be realized for each political party.*

***Keywords:*** *Financial Assistance, Political Parties, State Budget/Regional Budget, Democracy.*